

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 27/M-DAG/PER/5/2017
TENTANG PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN**

(Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

PUTRI MENTARI

NPM : 1421030293

Jurusan: Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439H / 2018M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 27/M-DAG/PER/5/2017
TENTANG PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN**

(Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)

Pembimbing 1: Drs. Haryanto H, M.H

Pembimbing 2: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

PUTRI MENTARI

NPM : 1421030293

Jurusan: Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439H / 2018M

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari pola perekonomian di Desa Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan. Pada perekonomian ini mencerminkan bagaimana peran pemerintah dalam penetapan harga acuan pembelian bahan pokok di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang terjadi saat ini. Meski harga bahan pokok pada saat ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, namun pada saat Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Natal, dan hari-hari raya lainnya ataupun menjelang tahun baru terlalu sering harga itu berubah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2017 oleh petani dan pedagang dalam menetapkan harga pembelian dan penjualan bahan pokok di Desa Purwotani? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Harga Acuan Pembelian dan Penjualan Bahan Pokok oleh Petani dan Pedagang?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data dianalisis dengan analisa kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan petani di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung, Lmapung Selatan dan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2017 adalah petani dan pedangan dalam menetapkan harga pembelian di Desa Purwotani, berdasarkan harga yang terjadi di pasar, kualitaas/kuantitas jenis bahan pokok, kondisi cuaca, persediaan barang, harga pupuk/pakan ternak, permintaan/penawaran saat hari raya dan dalam menetapkan harga penjualan oleh pedagang ke masyarakat adalah berdasarkan harga yang didapat dari petani/pemasok, jenis kuantitas/kualitas barang bahan pokok, biaya transportasi, dan kesulitan/berebutan saat mendapatkan barang. Tinjauan hukum Islam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Hraga Acuan Penjualan di Konsumen dalam hal ini belum sesuai dengan Syariat Islam, tetapi peraturan ini masih dibutuhkan apabila pedagang tidak mau menjual barang dagangannya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak ataupun pedagang menjual barang dagangannya di bawah harga pasar.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **PUTRI MENTARI**

Npm : **1421030293**

Jurusan : **Muamalah**

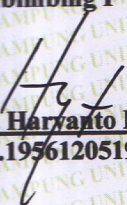
Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Drs. Haryanto H. M.H.
NIP.195612051983031002

Pembimbing II


Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I.
NIP.1969010519980301003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


H.A. Kumedhi Jafar S.Ag., M.H.
NIP.19720826003121002



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)”**, disusun oleh :
Putri Mentari, NPM : 1421030293, Jurusan: Muamalah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Kamis / 15 Maret 2018 Waktu : 09.00-11.00, Tempat : Ruang Sidang IV Fakultas Syari'ah.

Tim Dewan Penguji

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Sekretaris : Muhammad Irfan, M.H.I.

Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji II : Drs. Haryanto H., M.H.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹ *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. An-Nisa Ayat 29.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah Meri Eka Mirza dan Ibu Siti Imani tercinta yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku.
2. Adikku Meidy Putra Ananta dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa yang mengiasi hidupku saat senang maupun susah.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Mentari
NPM : 1421030293
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Sugih, 24-Oktober-1995
Agama : Islam
Alamat : Gunung Madu Plantations (GMP), Perumahan
Enam (6) Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung.

Adapun pendidikan yang ditempuh yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Buyut Udik, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung lulus pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengan Pertama (SMP) Satya Dharma Sudjana Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas 1 (SMA 1) Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung lulus pada tahun 2014.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)**”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S.H. Atas terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. H.A. Khumeidi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
4. Drs. Haryanto. H, M.H selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanan serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

5. Bapak ibu Dosen Syari'ah dan Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan umum yang telah membantu dalam melakukan pencerahan, mentransfer serta mentransformasi ilmu pengetahuannya.
6. Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Buyut Udik, Sekolah Menengan Pertama (SMP) Satya Dharma Sudjana dan Sekolah Menengah Atas 1 (SMA 1) Terusan Nunyai yang telah mendidik saya hingga saya ke perguruan tinggi.
7. Masyarakat desa Purwotani yang membantu saya dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ayah (Meri Eka Mirza) dan Ibu (Siti Imani) tercinta yang senantiasa memberikn do'a, pengorbanan, kasih sayang, semangat, pengertian, motivasi serta inspirasi kepadaku.
9. Sahabat-sahabatku Afiful Ichwan S.E, Siti Nu'aini S.H, Sinta Bela S.H, Heni Wati S.H, Anis Juliana Sari S.H, Rahmi Nurjanah, dan khususnya Muamalah A angkatan 2014 seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan selama perkuliahan hingga proses skripsi, serta telah menjadi teman yang baik dalam proses perkuliahan dan berbagi keluh kesah serta keceriaan.

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

bemanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu muamalah.

Waassalamualaiku Wr.Wb

Bandar Lampung, Ferbruari 2018

**Putri Mentari
NPM : 1421030293**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORISTIS	
A. Konsep Penetapan Harga	16
1. Penetapan Harga Dalam Konsep Ekonomi	16
2. Tujuan Penetapan Harga	18
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga.....	20
4. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga.....	22
5. Dampak Dari Penetapan Harga Oleh Pemerintah	24
B. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam.....	25
1. Penetapan Harga Dalam Konsep Ekonomi Islam	25
2. Macam-Macam Harga	36
3. Konsep Harga Yang Adil	40
4. Pendapat Para Ulama Tentang Penetapan Harga Oleh Pemerintah.....	43
5. Batasan-Batasan Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Harga	50
C. Latar Belakang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017.....	51
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Letak Geografis Desa Purwotani.....	54
2. Orbitas Desa Purwotani.....	54
3. Sejarah Berdirinya Desa Purwotani	55
4. Kondisi Demografis Desa Purwotani.....	59

D. Hasil Penelitian dan Wawancara.....	61
1. Gambaran Petani dan Peternak Desa Purwotani	61
2. Gambaran Pedagang Desa Purwotani	63
3. Upaya Pemerintah Dalam Menstabilkan Harga	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Penetapan Harga Oleh Pedagang, Peternak, Petani dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia	76
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no. 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan dikonsumsi.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Purwotani Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 3.2 Data Keagamaan Warga Desa Purwotani	59
Tabel 3.3 Data Tempat Ibadah Warga Desa Purwotani	60
Tabel 3.4 Lahan Pertanian Desa Purwotani	60
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	61
Tabel 3.6 Pedagang Desa Purwotani.....	65
Tabel 3.7 Daftar Harga Pembelian di Petani Saat Harga Stabil.....	70
Tabel 3.8 Daftar Harga Pembelian di Petani Saat Harga Naik	70
Tabel 3.9 Daftar Harga Penjualan di Konsumen Saat Harga Stabil	72
Tabel 3.10 Daftar Harga Penjualan di Konsumen Saat Harga Naik	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapat informasi dan gambaran yang jelas serta dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. “Analisi Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di petani dan Harga Acuan Penjualan Dikonsumen”, adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama islam.¹ Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).²
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 27/M-DAG//PER/5/2017 adalah peraturan Menteri untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

harga beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, perlu melakukan perubahan terhadap harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.³

3. Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya wajar mencakup keuntungan antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.⁴
4. Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya wajar mencakup keuntungan antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.⁵

Bahwa beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan penelitian dengan judul “Analisi Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen” tersebut adalah memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas, serta yang berkaitan dengan hukum islam penetapan harga oleh pemerintah.

³Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 27/M-DAG//PER/5/2017. Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di petani dan Harga Acuan Penjualan Di konsumen.

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen . Pasal (1).

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen . Pasal (1).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis tertarik memilih judul dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Obyektif

Pola perekonomian yang ada di suatu daerah di desa Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan memiliki sebuah fenomena yang dapat mencerminkan bagaimana peran pemerintah dalam Penetapan harga acuan pembelian bahan pokok dipetani dan harga acuan penjualan di konsumen yang terjadi saat ini. Meski harga bahan pokok pada saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kementerian perdagangan hingga memiliki ruang bernafas bagi sebagian masyarakat, namun pada saat hari Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Natal, dan hari-hari raya lainnya ataupun menjelang tahun baru terlalu seringnya harga itu berubah. Penjual bahan pokok yang ada di desa Purwotani memiliki suatu pola harga yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa harga yang berkembang di masyarakat tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masyarakat yang mayoritas petani karet.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah jurusan Muamalah dan tersedianya literatur yang menunjang seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian dan data dalam usaha

menyelesaikan skripsi ini maka sangat memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.

- b. Lokasi penelitian terjangkau dari segi transportasi dan diperbolehkan dalam proses penelitian

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik, (sama-sama saling membutuhkan).

Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudalah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Jual beli merupakan pondasi utama dalam perekonomian negara. Dengan perekonomian negara yang baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun dapat terjamin. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah

⁶ Muhammad, *Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 22.

kestabilan harga bahan pokok. Dimana memudahkan pembelian konsumen, tapi tetap menguntungkan bagi petani. Kesehatan harga bahan pokok sangat bergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan melalui interaksi kekuatan permintaan dan penawaran secara sehat. Kestabilan harga pun akan tercipta apabila kondisi dalam keadaan wajar serta normal dan biaya distribusi yang kecil. Namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, banyak permintaan disertai kekurangan bahan pokok maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pasti pada akhirnya akan mengganggu hak rakyat secara umum.

Seperti Pola perekonomian yang ada di suatu daerah di desa Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan memiliki sebuah fenomena yang dapat mencerminkan bagaimana peran pemerintah dalam Penetapan harga acuan pembelian bahan pokok petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang terjadi saat ini. Pada saat hari Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Natal, dan hari-hari raya lainnya ataupun menjelang tahun baru terlalu seringnya harga itu berubah, Penjual bahan pokok yang ada di desa Purwotani memiliki suatu pola penetapan harga yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa harga yang berkembang di masyarakat tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masyarakat yang mayoritas petani karet. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga bahan pokok, ditambah dengan mayoritas masyarakat dengan pendapatan di bawah rata-

rata atau pas-pasan, hal ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhannya.

Untuk meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan harga pada beberapa daerah di Indonesia, dalam hal ini diatur langsung oleh pemerintah, dimana langsung ditangani oleh kementerian perdagangan yang mengeluarkan peraturan harga barang-barang pokok. Peran pemerintah dan interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna mencapai tujuan perekonomian yang kuat. Dengan kata lain, penentuan harga tidak dapat dimonopoli oleh sepihak saja melainkan terjadi kesepakatan dalam penentuan harga. Hal tersebut guna meminimalkan terjadi kecurangan atau pun kerugian di salah satu pihak.

Pada tanggal 16 Mei 2017 Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, perlu melakukan perubahan terhadap harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. pada pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.

2. Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen, Pelaku usaha pedagang dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengacu pada harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan oleh menteri perdagangan, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga bahan pokok, serta keterjangkauan harga bahan pokok di konsumen.

Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, telah menetapkan harga acuan pembelian di petani dan penjualan di konsumen yang mana merupakan faktor penting dalam keseimbangan harga dan mencegah usaha-usaha ke arah ketidakstabilan harga. Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan kegiatan

perdagangan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (*public goods*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi. Maka penulis akan mengkajinya melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2017 oleh petani dan pedagang dalam menetapkan harga pembelian bahan pokok di Desa Purwotani?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Harga Acuan Pembelian bahan pokok oleh Petani dan pedagang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini diantaranya :

1. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2017 oleh petani dan pedagang dalam menetapkan harga bahan pokok di Desa Purwotani.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang harga acuan pembelian bahan pokok oleh petani dan pedagang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang keadaan kebutuhan bahan pokok dan harga di desa purwotani dan dapat lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, serta membentuk harga sesuai dengan hukum syariat islam.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang harga-harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang di tetapkan oleh pemerintah kemetrian perdagangan apabila dalam praktiknya harga penjualan dan pembelian merugikan beberapa pihak dan terdapat monopoli bahan pokok di desa purwotani, serta memahami

mengenai hukum penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dimana yang penelitiannya di lakukan pada latar alamiyah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu yang dilakukan dengan cara dalam kancan kehidupan sebenarnya, Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relefan dengan masalah yang diangkut untuk diteliti.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisa kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

Maksud dari analisis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.⁷

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh”. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:⁸

- a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.
- a. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung.

⁷ Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 68.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.⁹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di karnakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang di ambil karnapertimbangan tertentu.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai beriku:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 81.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.¹¹ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian penetapan harga oleh pemerintah.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹² Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik yang dilakukan oleh pedagang di desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan terhadap penetapan harga oleh pemerintah dalam penetapan harga acuan pembelian dipetani dan harga acuan dikonsumsi.

c. Wawancara

Wawancara adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan penetapan harga yang tengah terjadi dalam masyarakat. Hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dengan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 202

¹² Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 227.

menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.¹³

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan *Editing*

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b. Sistematika Data (sistematising)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Deduktif. . Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

¹³ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 137.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumental dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks pendekatan deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Penetapan Harga

1. Penetapan Harga Dalam Konsep Ekonomi

Dalam langkah awal untuk memahami konsep penetapan harga, maka perlu adanya uraian terhadap pengertian dari penetapan dan pengertian dari harga sebagai berikut:

a. Pengertian Penetapan

Pe-ne-tap-an dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, dan pelaksanaan.¹⁴

b. Pengertian Harga

Harga menurut Menurut Kotler adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Perusahaan menetapkan harga dalam berbagai cara. Di dalam perusahaan kecil, harga seringkali ditetapkan oleh manajemen puncak. Di perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditangani oleh para manajer divisi atau manajer lini produk.¹⁵

Sedangkan menurut Michael J. Etzel dikutip Danang Sunyoto adalah nilai yang disebutkan dalam mata uang atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar (*price is value expressed in terms of*

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Offline 1.3)

¹⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2001), h.

dollars or monetary of exchange). Senada dengan Indriyo Gitosudarmo Harga itu sebenarnya merupakan nilai yang dinyatakan dalam suatu mata uang atau alat tukar, terhadap suatu produk tertentu. Dalam kenyataan besar kecilnya nilai suatu harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor fiskal saja yang diperhitungkan tetapi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain berpengaruh pula terhadap harga.¹⁶

Bahwa dari pengertian di atas dapat penulis tarik kesimpulan pengertian dari penetapan dan pengertian dari harga di atas, penetapan harga adalah menetapkan, menentukan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.

Menurut Kotler, penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga pertama kali. Dalam situasi tertentu, para konsumen sangatlah sensitif terhadap harga, sehingga harga yang relatif tinggi dibanding para pesaingnya dapat mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen. Akan tetapi, dalam kasus lainnya harga dapat dipergunakan sebagai indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil bahwa harga yang lebih tinggi dipandang positif oleh segmen tertentu. Kemudian harga produk dapat memberikan baik pengaruh positif maupun negatif terhadap konsumen. Ini merupakan konsep penting yang harus diingat oleh para manajer.¹⁷

¹⁶ Danang Sunyoto, *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*, (Yogyakarta, PT. Buku Seru, h. 179.

¹⁷ Philip Kotler, *Op.Cit.*, h. 340.

2. Tujuan Penetapan Harga

Kebijakan penetapan harga oleh manajemen memastikan pemilihan (*recovery*) atas semua biaya dan mencapai laba, dalam kondisi yang sulit sekalipun. Meskipun penawaran dan permintaan biasanya merupakan faktor penentu dalam penetapan harga, penetapan harga jual yang menguntungkan memerlukan pertimbangan atas biaya. Tender kompetitif atas suatu pekerjaan tertentu, misalnya merupakan pengambilan keputusan penetapan harga yang sulit apabila hanya ada sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada pengalaman di masa lampau dengan jenis produk jasa yang terlibat.

Dalam penetapan harga oleh pemerintah Indonesia, kementerian perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi dan terendah pada bahan pokok pemerintah mengikuti prosedur yang mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan/atau biaya lain.¹⁸

Dalam penetapan harga, terdapat beberapa tujuan dalam penetapan harga, ini disampaikan menurut Andrian Payne yang dikutip oleh Danang Sunyoto. tujuan dalam menentukan penetapan harga antara lain sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No 27/M-Dag/Per/5/2017, Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Pasal 1).

¹⁹ Danang Sunyoto, *Op.Cit.* h. 181.

a. Bertahan

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, untuk kebijaksanaan dalam penetapan harga jangan sampai merugikan usaha mempertahankan atau mengembangkan bagian pasar tersebut.

b. Memaksimalkan Laba

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode tertentu, Tujuan ini biasanya menjadi anutan setiap usaha bisnis. Kelihatannya usaha mencari untung mempunyai konotasi yang kurang enak seolah-olah menindas konsumen. Padahal sesungguhnya hal yang wajar saja. Setiap usaha untuk bertahan hidup memerlukan laba. Memang secara teoritis harga bisa berkembang tanpa batas.

c. Memaksimalkan Penjualan

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. Tujuan penentuan harga disini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif.

d. Pengembangan atas investasi

Tujuan penetapan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi (*return on investment*) yang diinginkan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi harga, yaitu: *pertama*, Memperkirakan permintaan produk (*Estimate for the product*), *kedua* Reaksi Pesaing (*competitive reactins*).

a. Memperkirakan permintaan produk (*Estimate for the product*).

Terdapat 2 (dua) langkah dalam memperkirakan permintaan produk (*Estimate for the product*), yaitu:²⁰

1) Memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan (*The expected price*)

Harga yang diharapkan untuk suatu produk adalah harga yang secara sadar atau tidak sadar dinilai oleh konsumen atau pelanggan. Dalam hal ini penjual harus dapat memperkirakan bagaimana reaksi pelanggan atau konsumen, apabila dalam suatu produk harganya dinaikkan atau diturunkan.

2) Memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda (*Estimate of sales at varios price*)

Manajemen eksekutif harus juga dapat memperkirakan volume penjualan dengan harga yang berbeda sehingga dapat

²⁰ *Ibid.*, h. 184.

ditentukan jumlah permintaan, elastisitas permintaan dan titik impas yang mungkin akan tercapai.

b. Reaksi pesaing (*Competitive Reactions*)

Pesaing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan harga terutama sekali ancaman persaingan yang potensial. Sumber persaingan tersebut berasal dari 3 (tiga) macam yaitu:²¹

- 1) Produk yang serupa, misalnya rokok jarum 76 dengan rokok bintang buana, minuman energi M150 dengan minuman ExtraJos.
- 2) Produk pengganti, misalnya merek gulaku dengan merek tropica naslim, susu sapi dengan susu kedelai.
- 3) Produk yang tidak serupa, tetapi mencari konsumen yang sama, misalnya jasa pendidikan perguruan tinggi dengan produk komputer, produk sepeda motor dengan mobil.

c. Bauran pemasaran lainnya (*Other Parts Of The Marketing Mix*).²²

Terdapat 3 (tiga) macam Bauran pemasaran lainnya (*Other Parts Of The Marketing Mix*), yaitu:

- 1) Produk: kegunaan produk, baru atau tidaknya produk, modifikasi produk dan lain-lain.

²¹ *Ibid.*, h. 185.

²² *Ibid.*, h. 185.

- 2) Saluran distribusi: tipe saluran dan tipe pialang yang dipergunakan akan mempengaruhi penetapan harga, harga grosir tertentu berbeda dengan harga ke pengecer.
- 3) Promosi: Promosi dilakukan oleh produsen dan jika dilakukan oleh distributor tentu berbeda dalam menetapkan harga kepada distributor.

4. Peran Pemerintah Pemerintah Dalam Penetapan Harga

Karena mekanisme pasar yang berbeda, harga pasar yang tercapai pun berbeda-beda. Kadang-kadang harga yang terbentuk di pasar berakibat merugikan konsumen atau malah merugikan produsennya. Oleh karena itu, dinegara tertentu, pemerintah, dalam batas-batas tertentu, kadang kala melakukan itervensi dalam pembentukan harga.

Tujuannya penetapannya agar harga yang tercapai tidak merugikan produsen maupun konsumen, sehingga roda ekonomi tetap berputar. Bentuk campur pemerintah tersebut adalah melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET), penetapan harga terendah, pajak, atau melalui subsidi. Berikut campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga:²³

a. Harga Eceran Tetinggi

Pada harga eceran tertinggi (HET) atau dalam baha inggrisnya dikenal dengan nama *ceiling Price*, pemerintah menetapkan harga sebuah barang. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut.

²³ Alam S, *Ekonomi*, (Jakarta, Esis, 2006), h. 143-145.

b. Harga Eceran Terendah

Pada komoditas tertentu, pemerintah kadang kadang ikut campurtangan dengan menetapkan harga terendah (*Floor Price*). Tujunnya adalah untuk melindungi produsen.

c. Penetapan pajak

Dalam pembentukan harga, Pemerintah membebankan pada banyak jenis barang dan jasa yang yang diperjual belikan dipasar. Pada akhirnya akan membentuk pergeseran kurva penawaran dan akan menaikkan harga serta menurunkan kualitas/kuantitas barang yang diperjual belikan.

d. Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat juga melakukan campur tangan dalam pembentukan harga di pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok atau perusahaan yang baru berkembang. Kebijakan ini dijalankan pemerintah dalam rangka pengendalian harga untuk melindungi produsen dan konsumen.

5. Dampak Dari Penetapan Harga Oleh Pemerintah

Penetapan harga eceran tertinggi (HET) akan memberikan dampak atau pengaruh sebagai berikut:²⁴

- a. dapat Menurunkan harga pasar,
- b. Menciptakan kelebihan permintaan (atau dengan kata lain kekurangan penawaran),
- c. Menurunkan kuantitas yang di perjual belikan, dan Menurunkan penerimaan produsen,
- d. serta dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena harga yang berlaku dipasar tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Penetapan harga eceran terendah (HET) akan memberikan dampak atau pengaruh sebagai berikut:²⁵

- a. Menaikkan harga pasar,
- b. Menciptakan kelebihan penawaran (atau dengan kata lain kekurangan permintaan),
- c. Menurunkan kuantitas yang diperjualbelikan, dan
- d. Menaikkan atau menurunkan penerimaan produsen, tergantung elastisitas permintaan produknya.

²⁴ *Ibid.*, h. 144.

²⁵ *Ibid.*, h. 145.

B. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam

1. Penetapan Harga Dalam Konsep Ekonomi Islam

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-saman* dan *As-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*As-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *As-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *As-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar).²⁶

Imam Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa *ta'sir* (penetapan harga) adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi harga itu agar mereka tidak merugikan orang lain.²⁷

Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat mematuhi harga pasar ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan harga terjadi di madinah pada saat itu dikarenakan kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak di barengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan mmonopsonostik, maka

²⁶ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 379.

²⁷ *Ibid.*, h. 380.

tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadis yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَا السَّعْرُ ، فَسَعَّرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

(رواه خمسة إلا النسا ئي وصححه ابن حنن)

Artinya: Anas bin malik ra berkata “harga di kota madinah menjadi mahal dimasa rasulullah SAW, maka orang-orang berkata, “wahai rosullullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami. Maka rosulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki, sesungguhnya aku berharap agar dapat bertemu kepada Allah SWT dan berharap tiada seorangpun kamu yang menuntut aku lantaran berbuat zalim dalam darah dan harta (HR. Imam lima kecuali Nasa’i dan Ibnu Hinnan Menganggapnya sahih).²⁸

Dalam mengomentari hadist ini A. Hasan mengatakan bahwa sebagian besar keperluan penduduk madinah didatangkan dari luar daerah, kemahalan bukan terjadi karena harga yang dinaikan oleh pedagang madinah, melainkan pengambilan mereka dari luar sudah tinggi, jika Rosullullah SAW menetapkan harga maka para pedagang tentu dapat merugikan sehingga mereka enggan untuk berdagang di madinah.²⁹

²⁸ Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 109.

²⁹ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Konisia, 2003), h. 269.

Dari hadits di atas para ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal mematok harga: haram atau sah dilakukan. Hadis di atas menjelaskan mematok harga adalah haram, dan pematokan harga dianggap kezaliman. Dan tentu, Rasulullah SAW tidak ingin melakukan kezalimanterhadap siapapun. Tetapi kondisi sosial di zaman Rasulullah jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini dalam hal baik tidaknya mematok harga. Di masa Rasulullah mungkin posisi penjualan lemah sehingga pematokan harga adalah memberatkan baginya, sekarang kondisi telah berubah, sekarang posisi penjual kuat dalam banyak hal. Penjual, di era sekarang tidak akan terkena dampak yang merugikan karena pematokan harga diprioritaskan bagi pembeli, yang kondisinya sekarang berposisi lemah.³⁰

Berangkat dari ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradim minkum/mutual goodwill*), dalam Al-Qur'an QS.An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

³⁰ Faruq Annabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), h. 59.

*janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³¹

Ayat di atas menjelaskan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai moralitas mutlak harus ditegakkan.³² Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis melakukan jual beli. Namun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³³

Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga, yaitu *'mal al-mitsl (equivalen compensation* yang setara) dan *tsaman al-mitsl (equivalen price/* harga yang setara). Ibn Taimiyah mengatakan, “kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara. Itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*).” Ibn Taimiyah membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.³⁴

Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar, dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan

29. ³¹ *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. An-Nisa Ayat

³² M.B. Hendri Anto, *Op.Cit.*, h. 270.

³³ Lukman Hakin, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173.

³⁴ *Ibid.*,

harga yaang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah zalim, seperti adanya penimbunan dan monopoli.

Pasar rentang dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidak adilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar juga rentang dengan hal-hal yang zalim maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan dan syariat, yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar harus di bangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁵

a. Prinsip *Ar-ridha*,

Prinsip *Ar-ridha* yakni segala transaksi yang di laakukan harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁶

Begitu pula dengan penentuan harga harus di bangun dengan prinsip *Ar-ridha* pada masing-masing pihak.

³⁵ Abdul Aziz, *Etikia Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 268.

³⁶ *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS. An-Nisa Ayat

b. Perinsip persaingan sehat (*fair competition*),

Perinsip persaingan sehat (*fair competition*) yakni mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli, yang mana setiap barang yang ditahan akan membahayakan konsumen dan orang banyak.

c. Perinsip kejujuran (*honesty*),

Perinsip kejujuran (*honesty*) kejujuran atau tidak berbohong / menipu merupakan pilar yang sangat penting dalam agama islam, sebab kejujuran adalah nama dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongandan penipuna dalam bentuk apapun, sebab nilai kejujuran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

Macam-macam penipuan yang di larang sebagai berikut:³⁷

1) Penipuan dalam kuantitas

Penipuan dalam kuantitas termasuk menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga kuantitas banyak. Misalnya menjual beras 10Kg karena jumlah banyak dan tidak memungkinkan untuk menghitung maka penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang atau mengurangi jumlah timbangan yang di perjualkan kepada pembeli. Perlakuan penjualan yang tidak jujur di samping

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 228.

merugikan penjual juga merugikan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengurangi *utility*, begitu pula dengan pembeli akan mengalami penurunan *utility*, praktik pengurangan timbangan dan mengurangi takaran adalah contoh klasik yang selalu digunakan dalam penipuan kuantitas.

2) Penipuan dalam kualitas

Dalam penipuan kualitas seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Contoh penipuan dalam kualitas adalah penjual menjual beras dengan kualitas dalam konsisi bagus dengan harga Rp.12.000. pada kenyataannya tidak semua penjual beras dengan kualitas yang sama, sebagian penjual beras dengan kualitas yang sama namun harga tetap sama yaitu Rp.12.000. pembeli tidak mengetahui dengan jelas kualitas beras hanya penjual yang tahu dengan kualitas beras yang diperjual belikan.

3) Penipuan dalam harga

Penipuan dalam harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli dan penjual.

Contoh penipuan dalam harga adalah seorang anak laki-laki ke pasar membeli beras dengan harga pasaran Rp.12.000, pedagang menawarkan Rp.15.000, setelah terjadi tawar

menawar makan di peroleh kesepakatan Rp.14.000. meskipun kedua belah pihak suka sama suka, namu hal ini di larang karena kerelaan anak laki-laki bukan kerelaan sebenarnya namun ia rela dalam keadaan tertipu.

4) Penipuan dalam waktu pembayaran

Yang termasuk penipuan jenis waktu pembayaran adalah, penjual tidak tahu persi akan menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan menyerakan pada esok hari. Walaupun tidak berkaitan dengan harga tetapi masalah waktu adalah sangat penting bagi pembeli.

d. Prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*),

Prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*) pelaksanaan prinsip ini adalah, transaksi yang di lakukan dituntut di lakukan benar dalam pengungkapan dan kehendaan yang sebenarnya.

Adapun hal yang dapat diperhatikan dalam penetapan harga dalam Ekonomi Islam, yaitu:³⁸

a. Permintaan

Permintaan Pemerupakan salah satu elemen yang menggerakan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu taimiyah untuk menunjukan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal

³⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 312.

dari Allah Swt. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diurai sebagai berikut:

- 1) Harga barang yang bersangkutan merupakan determin penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pada sebaliknya.
- 2) Pendapatan Konsumen
- 3) Harga barang lain yang terkait
- 4) Selera konsumen
- 5) Ekspektasi (pengharapan)
- 6) Masalah

Ibnu Taimiyah mencatat ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yang tertulis dalam satu bagian dalam bukunya Fatawa, yaitu:³⁹

- 1) Keinginan Penduduk (Ar-raghabah)

Yaitu keinginan atas barang-barang berbeda dan sering kali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpahnya atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin ia diminati oleh masyarakat. Dalam konvensional hal ini dikenal dengan istilah *preference* (minat).

- 2) Jumlah orang yang meminta

³⁹ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997), h.107.

Semakin banyak orang yang meminta dalam suatu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang.

3) Kuat atau lemahnya permintaan

Kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.

4) Kualitas pembeli (al-mu'awid)

Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang punya kredibilitas yang buruk, sering bangkrut, mengulur ulur pembayaran akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.

5) Jenis uang yang digunakan

Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual-beli. Hal di atas harus dapat terjadi, karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa karena adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga.

b. Penawaran

Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenali sebagai kekuatan penting didalam pasar. Ibnu Taimiyah, misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang dipasar. Dalam pandangannya penawaran dapat

berasal dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain:

1) Masalah

Pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah masalah yang terkandung dalam yang diproduksi barang semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya, produsen dengan tingkat keimanan 'biasa' kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang atau jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsennya akan menganggapnya sudah baik sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan.

2) Keuntungan

Keuntungan menurut Ibnu Khaldun yaitu jumlah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam perdagangan. Sedangkan perdagangan menurutnya adalah usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan property yang dimilikinya, dengan cara membeli komoditi dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal. Keuntungan merupakan bagian dari masalah

karena ia dapat mengakumulasi modal yang pula akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktifitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh masalah lebih besar lagi untuk mencapai falah.

2. Macam-Macam Harga

Dalam islam, harga yang timbul terdiri dari persaingan dan peraingan tidak sempurna dari ekonomi di zaman sekarang dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Harga Monopoli

Menurut pendapat umum, harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi, dan hasil yang dibuat oleh seseorang yang melakukan monopoli lebih rendah daripada yang dibuat di bbawah kondisi bersaing, yaitu persaingan dimana persaingan tidak sempurna. Pada umumnya produksi monopoli lebih rendah daripada produksi kompeitif. Harga-harga lebih tinggi yang harus dibayar karena orang melakukan monopoli ini dengan nyata mengurangi pendapatan dari karyawan dan masyarakat miskin pada umumnya, dan ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena tidak sosial dan merampas hak si miskin juga masyarakat seutuhnya.⁴⁰

Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan besar dan bisnis mereka yang

⁴⁰ Nuralaili, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung, Percetakan OSA, 2013), h. 59-60.

tersebar luas telah menyebabkan praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen.

Untuk menghilangkan kejahatan dari kemewahan, maka perlu juga mengubah peraturan-peraturan perusahaan negara drastis, menghapus sistem pengelolaan keagenan dan memperkuat bagian umum. Hal ini akan menolong mengharmoniskan apa yang dikehendaki keadilan sosial islam dengan tuntutan dinamika ekonomi.

b. Kenaikan Harga yang Sebenarnya

Berikut sebab-sebab kenaikan harga sebenarnya adalah sebagai berikut:

1) Bertambahnya persediaan uang

Bertambahnya persediaan uang menyebabkan tuntutan yang efektif, tetapi perluasan uang yang terjadi di tengah pertumbuhan produksi yang mengecewakan, yang menyebabkan ketidak seimbangan antara ketersediaan barang-barang dan tuntutan moneter dan berakibat terhadap inflasi.⁴¹

2) Berkurangnya produktivitas

Kenaikan harga di karenakan berkurangnya produktivitas menghasilkan karena faktor musiman, perputaran atau faktor lainnya. maka banyak yang dapat di lakukan oleh negara islam untuk mencegah kenaikan harga dengan menukar fiskal atau

⁴¹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori & Praktek*, Di Terjemahkan oleh Potan Arif Harahap, (PT. IMTERMANSA), h. 153.

kebijakan moneter ataupun dengan meransum barang-barang konsumsi penting dan memberikan lisensi untuk investasi baru.⁴²

3) Bertambahnya kemajuan aktivitas

Bila aktivitas kemajuan dari suatu negara hanya menguntungkan beberapa orang yang mendapat hak-hak istimewa karena kelalaian dari banyak orang, kami tidak bersedia untuk menerima tipe kemajuan seperti itu dalam negara islam, walau keadilan dalam bentuk apapun tidak dapat dilektakkan karena kemajuan, masih dapat dibenarkan kalau kemajuan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Dalam Al-Qur'an Q.S Ar-Rum ayat 38 yang berbunyi:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya, “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”.⁴³

Karena itu suatu negara islam harus menggunakan ajaran islam sebagai faktor kemajuan sehingga manusia bersemangat untuk menggunakan kecakapannya untuk kebaikan sesama manusia.

⁴² Ibid., h. 154.

⁴³ Al-Qur'an Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), Q.S Ar-Rum ayat 38.

c. Kenaikan Harga Buatan

Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harga disebabkan oleh pengusaha spekulatif, penimbunan, perdagangan gelap, dan penyelundupan. Islam benar-benar mengutuk jenis kegiatan buatan dalam harga. Nabi SAW bersabda: *“orang yang menumpuk persediaan bahan pangan ketika kekurangan hal itu, (dengan maksud akan mendapatkan keuntungan), berdosa besar”*. HR. Muslim

Pada prinsipnya adalah, seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi. Dengan menahan, dan menyembunyikan, sesungguhnya menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya.⁴⁴ Dengan demikian ia melemahkan kemampuannya, juga menyebabkan miliknya tidak dapat digunakan orang lain disaat kekurangan, sehingga masyarakat tidak dapat kesempatan untuk memanfaatkannya dengan baik menurut islam.

d. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi harus dijual dipasar

⁴⁴ Nurlaili, *Op.Cit.*, h. 61.

sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Masalah spekulasi dalam kebutuhan pokok setiap orang kaya atau miskin dalam islam dikesampingkan. Ibn Umar meriwayatkan dizaman Nabi SAW mereka biasa membeli bahan pangan dari pemilik unta, tetapi Nabi melarang mereka membelinya, sampai bahan pangan itu dijual dipasar. Telah diketahui bahwa menyembunyikan bahan pangan untuk menaikkan harga yang dibuat-buat itu dilarang.⁴⁵

3. Konsep Harga Yang Adil

Kata '*adl*' dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 28 kali didalam Al-Qur'an. Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Al-Qur'an yaitu suatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat mengambil keputusan.⁴⁶

Menurut islam adil adalah norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga dibayarnya.

⁴⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Op.Cit.*, h 29-30.

⁴⁶ Abdul Aziz, *Op.Cit.*, h. 250.

Hal ini dapat di tangkap dalam pesan Al-Qur'an yang mennjadikan dalil tujuan agama samawi, bahkan adil adalah salah satu asma Allah SWT, dalam QS Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*Artinya, Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁷

Dalam islam adil sangatlah natural, untuk dipergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rosulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba orang yang menjualnya terlalu mahal diatas kepercayaan konsumen. Islam mengatur agar persaingan di pasar di lakukan dengan adil, setiap bentuk yang terdapat ketidak adilan itu di larang.⁴⁸

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan termasuk juga dalam penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan

⁴⁷ *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS Al-Maidah ayat 8.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 153.

dalam komitmen syariah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Konsep harga yang adil yang didasarkan konsep *equivalence price* (Harga Setara) jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dibandingkan dengan, misalnya, konsep *just price*. Konsep *just price* (hanya harga) hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasarkan pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Dalam situasi normal *equivalence price* (Harga Setara) ini dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas. Itulah sebabnya, syariat islam menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.⁴⁹

Harga yang adil juga mendapat perhatian dari banyak pemikiran dunia dimanapun, seperti pendapat Dun Scotus (1265-1308) berasal dari pemikir inggris. Menurutnya, harga yang adil adalah harus meliputi biaya yang di keluarkan oleh pedagang dalam pembelian, pengangkutan,

⁴⁹ M.B. Hendri Anto, *Op.Cit.*, h. 285.

penyimpanan, dan kompensasi untuuk industri, buruh dan biaya yang terkandung dalam barang dagangan itu ke pasar. Dan juga harga yang adil adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak, ini berarti harga harus meliputi biaya dan keuntungan yang cukup uuntuk memenuhi kebutuhan pedagang.⁵⁰

4. Pendapat Para Ulama Tentang Penetapan Harga Oleh Pemerintah

Dalam Al-Qur'an QS Al-hadidd ayat 25 sebagai berikuut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.⁵¹

Al-Mubarak dalam buku Mustaq Ahmad mengomentari ayat ini, dia berkata bahwasannya penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini di

⁵⁰ Ibid., h. 288.

⁵¹ Al-Qur'an Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), QS Al-hadidd ayat

sebutkan dengan besi sebagai simbol kekuatan) dengan demikian negara hendak mempergunakan kekuatan jika itu di butuhkan untuk mengjangkarkan keadilan ekonomi.⁵²

Harga dalam keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen. Meskipun demikian, terkadang harga yang keseimbangan ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar juga sering kali tidak berajan dengan baik.

Menurut pendapat Mannan (1992, h.218-219) di kutip oleh M.B. Hendri Anto menunjukan 3 fungsi dasar dari regulasi harga ini, yaitu:⁵³

- a. Harus menunjukan fungsi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan miskin melalui alokasi dan realokasi suber daya ekonomi.
- b. Harus menunjukan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat miskin dan kaya.
- c. Harus menunjukan fungsi moral demi menegakkan nilai-nilai syariat islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/*mutual goodwill*).

Konsep islam dalam kebijakan regulasi harga menurut Ibn Taimiyah (Al-Hisbah: 24) dalam buku Adiwarman A. Karim ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand*

⁵² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 160.

⁵³ *Ibid.*, h. 290.

(permintaan asli) dan *genuine supply* (penawaran asli) maka mekanisme pengendalian pasar dilakukan melalui *marketing intervention* (intervensi pemasaran). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* (permintaan asli) dan *genuine supply* (penawaran asli) maka mekanismen pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* (intervensi harga) untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Penyimpanan pasar) seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi dan sebagainya.⁵⁴

Khulafaur Rasyidin pun pernah melakukan *price intervention* (Penetapan harga). Dan juga Umar Ibn Khatab r.a. ketika mendatangi suatu pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta' menjual anggur kering pada harga di bawah harga pasar dan menegur "Naikan hargamu atau tinggalkan pasar kami".⁵⁵

Senada dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, pada saat kepemimpinan Umar bin Khatab beliau pun selaku pemegang kuasa tertinggi ikut campur tangan dalam menangani masalah harga pasar, dengan menentukan harga wajar yang tidak merugikan para pedagang dan tidak pula memberatkan konsumen. Yang mana melambungnya harga pada saat itu masa peperangan atau saat terjadi krisis politik disebabkan oleh pasokan barang tersebut dipasar yang tidak mencukupi, atau adanya penimbunan barang dan kelangkaan barang tersebut. Namun

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 154.

⁵⁵ Adiwarman A. Karim 2016, *Op.Cit.*, h. 188.

apabila tidak adanya barang tersebut karena penimbunan (*monopoli*), maka pemerintah berhak menahan pelaku penimbunan tersebut, sedangkan jika akibat kelangkaan barang, maka pemerintah diharuskan mengadakan pengadaan barang yang langka tersebut. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi masa penceklik sebagai akibatnya bahan makanan sangat langka oleh karena itu harga melambung tinggi. Untuk mengatasinya, Umar bin Khatab tidak mematok harga tertentu makanan tetapi mengirim dan mensuplai makanan dari Mesir dan dari Syam.⁵⁶

Jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga bersepakat bahwa hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, harga yang normal atau wajar, atau harga pasar. Penetapan harga ini dapat dilakukan jika:⁵⁷

- a. faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi (Penyimpanan pasar) terhadap *genuine factors*, dan
- b. terhadap urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat. Penyebab yang lazim menimbulkan distorsi ini antara lain:
 - 1) Adanya penimbunan (*ikhtikar*) oleh segelintir penjual.

⁵⁶ Lukman Hakim, *Op.Cit.*, h. 171.

⁵⁷ M.B. Hendri Anto, *Op.Cit.*, h. 297.

- 2) Adanya persaingan tidak sehat, menggunakan cara-cara yang tidak *fair*, antara penjual sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya.
- 3) Adanya keinginan yang amat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual dengan harga yang terlalu tinggi sementara pembeli ingin membeli dengan terlalu rendah.

Menurut Ibn Taimiyah dengan kondisi kekeringan (faktor musim) dan peperangan merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidak sempurnaan pasar. Misalnya, monopoli dalam perdagangan makanan dan barang serupa, dalam kasus ini, pemerintah harus menetapkan harga untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasannya.⁵⁸

Menurut Ibn Qudamah Al-Maqdisi Kebolehan *price intervention* (intervensi harga) dalam buku Adiwarman A. Karim antara lain karena:⁵⁹

- a. *price intervention* (intervensi harga) menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* (Keuntungan) dan sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power* (daya beli).

⁵⁸ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 387.

⁵⁹ Adiwarman A. Karim 2016, *Op.Cit.*, h. 189.

- b. Bila tidak dilakukan *price intervention* (intervensi harga) penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau *gaban faa-hisy*. Dalam hal ini penjual menzalimi si pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Sehingga *price intervention* (intervensi harga) berarti pula melindungi kepentingan masyarakat lebih luas.

Kebijakan dalam intervensi harga oleh pemerintah terbagi dalam dua jenis, yaitu:⁶⁰

- a. Intervensi harga yang zalim dan tidak sah

Intervensi harga dipandang zalim (tidak adil) apabila kebijakan ini menyebabkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Jika harga ditetapkan diatas harga maka akan merugikan konsumen, sementara jika di tetapkan di bawah harga pasar tentu akan merugikan konsumen.

- b. Intervensi harga yang adil dan sah

Intervensi harga di anggap adil jika kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Untuk itu intervensi harga yang adil justru akan membawa tingkat harga kepada posisi harga pasar yang seharusnya atau harga yang wajar. Dalam posisi ini baik penjual atau pembeli tidak di rugikan.

⁶⁰ M.B. Hendri Anto, *Op.Cit.*, h. 301.

Dalam melakukan kebijakan intervensi harga (Penetapan Harga) yang lazim di kenal atau di tetapkan oleh pemerintah antara lain:⁶¹

a. Penetapan Harga di atas Harga Pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar, hal ini dilakukan untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai dan bahkan dapat merugi.

b. Penetapan Harga di bawah Harga Pasar

Mekanisme penetapan ini merupakan kebalikan dari kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan harga lebih murah atau rendah dari pada harga pasar. Alasan yang umum dalam pengambilan kebijakan ini adalah melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi.

Selain itu, pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah dan ulama lainnya ternyata banyak didukung oleh 'ulama-'ulama sebelum dan sesudahnya, seperti Al Ghazali, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Mereka mempunyai konsep bahwasanya keadilan harga itu sangat penting dalam transaksi Jual Beli. Sehingga dalam menentukan laba seseorang harus menentukan sewajarnya tanpa ada kedzaliman di dalamnya. Karena segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, termasuk harga, 6 sehingga manusia sebagai khalifah fil ardhinya bertugas sebagai pengelola dengan sebaik-baiknya

⁶¹ *Ibid.*, h. 295.

5. Batasan-Batasan Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Harga

Bahwasannya ada batasan batasan tertentu terhadap negara melakukan intervensi dalam masalah ekonomi negara, adalah sesuai yang faktual, diakui dan tidak mungkin di pertanyakan kembali. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma tertera dalam syariah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka maka tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh melakukan intervensi jika di sana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari'ah. Adalah kewajiban negara untuk menetapkan hukum sistem pengadilan.⁶²

C. Latar Belakang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2017. Terlahirnya peraturan ini untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras pada pembelian di petani dan penjualan di konsumen. Dimana menteri perdagangan perlu melakukan perubahan terhadap harga acuan pembelian di petani dan harga

⁶² Mustaq Ahmad, *Op.Cit.*, h. 162.

acuan penjualan di konsumen. Mengingat menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.⁶³

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Petani

Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.⁶⁴

2. Harga Acuan Penjualan di Konsumen

Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biayalain.⁶⁵

Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.⁶⁶

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah

⁶³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Pasal 1, Ayat 3.

⁶⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Pasal 1, Ayat 1.

⁶⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Pasal 1, Ayat 2.

⁶⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Pasal 7.

berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang baru belum ditetapkan maka Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.⁶⁷ Berikut lampiran peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen:⁶⁸

Tabel 2.1
Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

No	Komoditi	Harga Acuan Pembelian Di petani	Harga Acuan Penjualan Di Konsumen
1	Beras Gabah Kering panen Gabah Kering Giling Beras	Rp.3.700/Kg Rp.4.600/Kg Rp.7.300/Kg	- - Rp.9.500/Kg
2	Jagung	Rp.3.150/Kg	Rp.4.000/Kg*
3	Kedelai Kedelai Lokal Kedelai Impor	Rp.8.500/Kg Rp.6.550/Kg	Rp.9.200/Kg** Rp.6.800/Kg**
4	Gula	Rp.9.100/Kg	Rp.12.500/Kg
5	Minyak Goreng	-	Rp.11.000/L
6	Bawang Konde Basah Konde Askip Rogol Askip	Rp.15.000/Kg Rp.18.300/Kg Rp.22.500/Kg	Rp.32.000/Kg
7	Daging Sapi	-	Rp.80.000/Kg
8	Ayam	Rp.18.000/Kg***	Rp.32.000/Kg
9	Telur Ayam	Rp.18.000/Kg***	Rp.22.000/Kg

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017

⁶⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Pasal 8.

⁶⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG//PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

Keterangan

- *) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak).
- **) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe, pakan).
- ***) Harga pembelian di peternak.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Purwotani

Desa Purwotani adalah sebuah desa paling ujung dari kecamatan Jati Agung, dimana memiliki letak geografis atau batasan desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan Dengan Desa Trisinar, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur.
- b. Sebelah Timur: Berbatasan Dengan Desa Sindang Anom, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur.
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan Desa Sindang Anom, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan Dengan Sinar Rejeki, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan.

2. Orbitasi Desa Purwotani

- a. Jarak desa Purwotani menuju ke Ibu kota Kecamatan Jati Agung sejauh 17 km,
- b. Jarak desa Purwotani menuju ke Ibukota Kabupaten Kalianda sejauh 100 km dan
- c. Jarak desa Purwotani menuju ke Ibukota Provinsi Bandar Lampung sejauh 30 km.

3. Sejarah Berdirinya Desa Purwotani

Pada tahun 1940 terjadi transmigrasi swakarsa dari daerah jawa tengah, jawa barat, jawa timur, Sumatra selatan sehingga masyarakat membuka lahan kawasan kehutanan untuk permukiman dan pertanian bahkan sebagian untuk perkebunan (kopi, cengkeh, lada).

Cara pembukaan hutan tersebut masyarakat secara berkelompok-kelompok menurut asal daerah dan sukunya, maka terjadi suatu permukiman (talang/umbul) yang di beri nama yang pertama yang pembukaanya antara lain umbul jued, talang langgar, talang sohar, dan talang acam. Pada tahun 1955 terbentuklah desa sindang anom dan talang/umbul tersebut secara administrasi dimasukan kedalam wilayah desa sindang anom.

Pada tahun 1971/1972 perusahaan jepang (PT. Mitsugoro IV) masuk sindang anom yang menggunakan sebagian wilayah tersebut termasuk peladangan yang di buka oleh masyarakat, namun untuk pemukiman masyarakat tidak di ganggu oleh PT. Mitsugoro IV sudah tidak berjalan lagi sehingga pada tahun 1984 untuk para karyawan PT. Mitsugoro IV di transmigrasikan di wilayah areal PT. Mitsugoro IV dengan nama Transmigrasi Lokal yang secara resmi di sahkan oleh departemen transmigrasi Republik Indonesia (RI) bapak martono, seluas 200 HA sebanyak 70 KK, dengan keputusan menteri transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.66/MEN/1986 tentang: Petunjuk Pelaksanaan, Pemanfaatan Dan Pendaya Gunaan Lahan, Bangunan, Peralatan, Dan

Sarana Lainnya Oleh Perusahaan Jepang (Pt.Mitsugoro, Pt.Pago, Pt.Daya Itoh, Pt.Daya Itoh, Pt.Hirema) Di Provinsi Lampung.

Oleh departemen transmigrasi lembaga pengkajian transmigrasi lembaga pengkajian transmigrasi melalui Bapak Ruslim Mangku Projo sebagai staf lembaga pengkajiann transmigrasi (LPT) Unit Jabung, dasarnya adalah surat tugas No. 006 / 01 / NPL - LPT / JB / III / 1986 untuk mengadakan tranmsmigrasi pemekaran di wilayah tersebut dengan luas 250 HA untuk permukiman dan peladangan.

Pada tahun 1988 dari masing-masing wilayah transmigrasi lokal, pemekaran, talang jued, talang langgar, talang sohar, dan talang acam melalui bapak Muhammad Hardianto mengumpulkan masing-masing kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penduduk Setempat mengadakan pertemuan yang tujuannya supaya bisa mengusulkan desa sendiri, maka dari hasil pertemuan tersebut telah sepakat mengusulkan desa dengan nama Desa Persiapan Purwotani yang terdiri dari wilayah transmigrasi lokal, transmigrasi pemekaran, talang jued, talang langgar, talang suhar dan talang acam.

Tersebentuknya Desa Persiapan Purwotani juga tidak luput dari bantuan kepala desa sinar rejeki Kecamatan Tanjung Bintang yaitu Bapak Nauri dan Desa Persiapan Purwotani merupakan hasil pemekaran dari Desa Sinar Rejeki Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 1989 usulan Desa Persiapan Purwotani menjadi desa

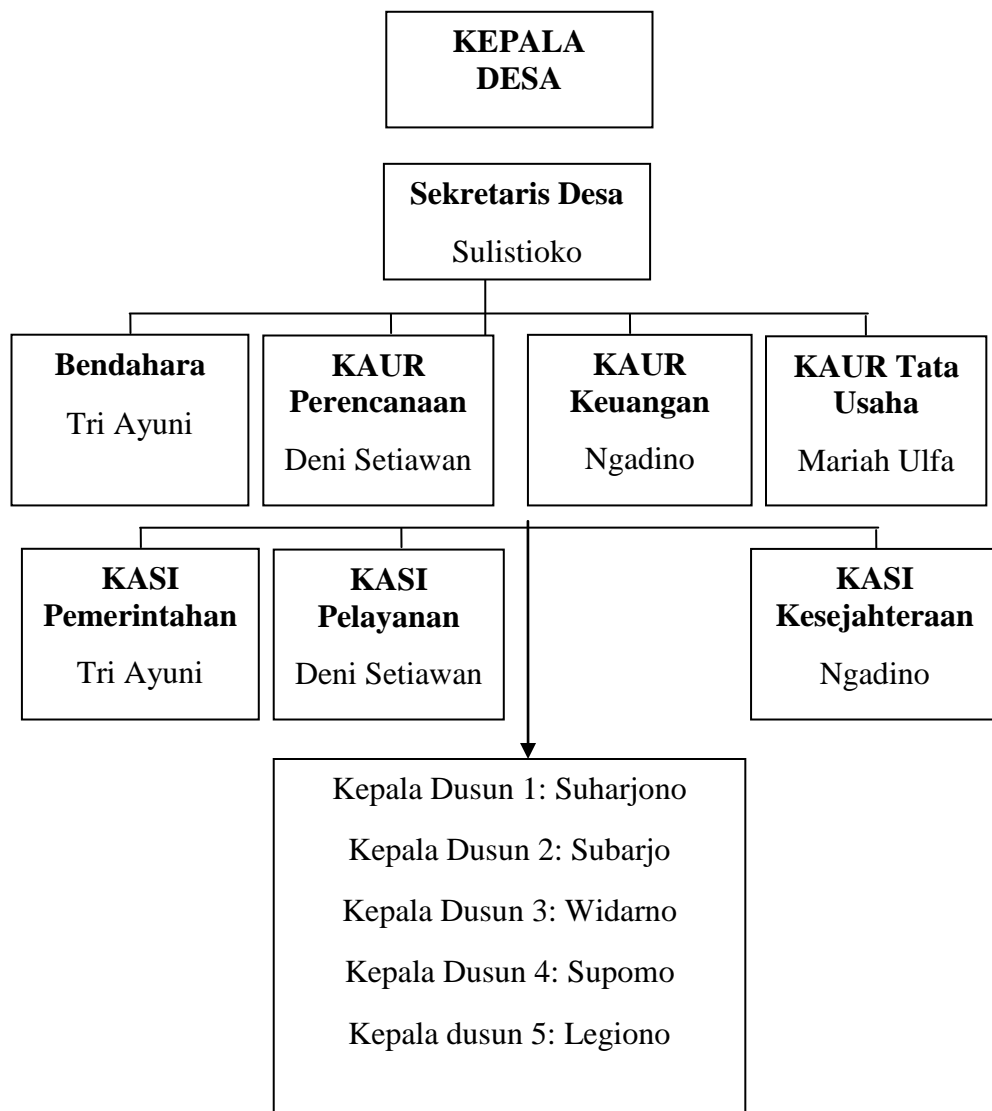
Persiapan Purwotani Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan surat gubernur kepala daerah tingkat 1 lampung nomor: **G/188/B.III/HK/1989** tanggal 02 Mei 1989 selanjutnya desa persiapan purwotani menjadi desa definitif 1993 dengan SK bupati nomor: **G/188/B.III/HK/1989**.

Selanjutnya Desa Persiapan Purwotani menjadi desa definitif tahun 1993 dengan SK Bupati No. G / 369 / B. II / HK / 1993 dan sekarang desa Purwotani merupakan masuk dalam Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dengan adanya program KOTA BARU dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pemindahan pusat pemerintahan keberadaannya terletak secara administrasi masuk dalam wilayah desa Purwotani yang luasnya 1300 Ha.

Adapun perangkat Desa Purwotani yang membantu pelaksanaan pemerintahan desa Purwotani saat ini dan demografi desa adalah sebagai berikut :

Struktur Desa Purwotani



Sumber: Data Desa Purwotani tahun 2017

4. Kondisi Demografis Desa Purwotani

Tabel 3.1
Data Penduduk Desa Purwotani Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Data	Uraian
1	Laki-laki	1.158 Jiwa
2	Perempuan	1.235 Jiwa
3	Kepala keluarga	625 KK

Sumber: Data Desa Purwotani tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, jumlah penduduk desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung setelah digolongkan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari sebagian besar jumlah penduduk desa Purwotani terdiri dari kaum laki-laki dengan uraian sebagai berikut: jumlah 1.158 jiwa laki-laki, 1.235 jiwa perempuan yang terdiri dari 625 kepala keluarga.

Tabel 3.2
Data Keagamaan Warga Desa Purwotani

No.	Nama Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	2.335 Jiwa
2	Kristen	21 Jiwa
3	Katolik	13 Jiwa
4	Hindu	4 Jiwa
5	Budha	-

Sumber: Data Desa Purwotani tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, data keagamaan warga desa Purwotani kecamatan Jati Agung mayoritas masyarakat beragama islam dengan jumlah 2.35 jiwa, kristen 21 jiwa, katolik 1 jiwa hindu 4 jiwa dan budha tidak ada.

Tabel 3.3
Data Tempat Ibadah Warga Desa Purwotani

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid / Musholah	11 unit
2	Gereja	-
3	Vihara	-
4	Pura	-

Sumber: Data Desa Purwotani tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, di Desa Purwotani tidak ada tempat ibadah untuk pemeluk agama selain Islam, untuk warga yang menganut agama selain Islam mereka akan beribadah diluar Desa Purwotani.

Tabel 3.4
Lahan Pertanian Desa Purwotani

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Sawah	20 Ha
2	Jagung	60 Ha
3	Coklat	2 Ha
4	Kelapa	4 Ha
5	Singkong	120 Ha
6	Karet	230 Ha

Sumber: Data Desa Purwotani tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, mayoritas lahan petani masyarakat desa purwotani adalah lahan karet dengan 230 Ha, singkong dengan luas 120 Ha, sawah 20 Ha, coklat 2 Ha, kelapa 4 Ha. Namun Pada saat musim panas beberapa masyarakat menjadikan lahan sawah menjadi lahan tanam singkong dan jagung unuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Purwotani. Sedangkan dalam kondisi penghujan masyarakat purwotani menggunakan lahan mereka untuk ditanami padi kembali.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

N o	Jumlah Penduduk Menurut mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	450 jiwa
2	Pedagang	25 Jiwa
3	PNS	25 Jiwa
4	Tukang	6 Jiwa
5	Bidan / Perawat	10 jiwa
6	TNI / Polisi	5 jiwa
7	Pensiunan	13 jiwa
8	Supir	27 Jiwa
9	Buruh	-

Sumber: Data Desa Purwotani 2017

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, jumlah penduduk menurut mata pencaharian di desa Purwotani Kecamatan Jati Agung mayoritas adalah petani dengan jumlah 450 jiwa, pedagang 25 jiwa, PNS 25 jiwa, tukang 6 jiwa, bidan 10 jiwa, TNI 5 jiwa, pensiunan 13 jiwa, supir 27 jiwa dan buruh tidak ada.

B. Hasil Penelitian dan Wawancara

1. Gambaran Petani dan Peternak di Desa Purwotani

Petani di desa purwotani mayoritas adalah petani singkong, namun terdapat juga petani padi dengan populasi yang lebih sedikit. Petani padi di desa purwotani tidaklah selalu mengandalkan hasil sawahnya, petani akan berpindah haluan ke hasil yang lain jika musim kemarau datang. Dalam prosesnya hasil padi dalam beberapa tahun ini tidaklah memuaskan untuk di jual dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut bapak sudar dan petani lainnya hal ini disebabkan karena kondisi cuaca dan musim yang tidak teratur, seperti musim hujan berkepanjangan yang mengakibatkan banjir dan gagal panen. Hasil ini juga berdampak pada harga jual yang tinggi oleh petani ke pengepul ataupun ke pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup petani sehari-hari.⁶¹

Dalam praktiknya petani akan menjual hasil panennya ke beberapa daerah tidak hanya dijual ke masyarakat desa Purwotani, namun petani akan menjual ke pengepul atau ke pabrik beras diluar desa Purwotani salah satunya pabrik beras milik pak handoyo yang berada di desa jati agung untuk di olah dari gabah menjadi beras dan akan di distribusikan ke pedagang lain. Dalam proses terbentuknya harga awal beras atau gabah yaitu pada petani yang menetapkan harga, menurut bapak riko jika panen gagal petani tidak akan melepas hasil panennya jika di hargai dengan harga rendah, hal ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan mengembalikan modal tanam yang mana nanti harga tinggi akan berkelanjutan ke pedagang.⁶² Harga yang akan dijual oleh petani pada saat musim gagal panen berkisaran Rp.5.000 hingga Rp.6.500/Kg dan pada saat hasil panen melimpah maka harga akan turun berkisaran pada harga Rp.3.700 hingga Rp.5.000/Kg.

Menurut bapak salimun penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah jika kondisi hasil panen yang kurang memuaskan akan sangat

⁶¹ Sudar, Wawancara Dengan Petani Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

⁶² Riko, Wawancara Dengan Petani Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

merugikan para petani, dikarenakan harga yang ditentukan oleh pemerinah tidak bisa menutupi modal yang dikeluarkan dan kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁶³

Selain para petani, ibu Trimi selaku peternak Ayam dan telur juga berbendapat bahwa jika harga telur dan ayam mengikuti permintaan pasar terlebih pada hari raya atau hari besar lainnya. Terkadang persediaan telur yang kami hasilkan kekurangan dan membuat pedagang yang berada di desa mencari ke tempat lain yang mana mengakibatkan harga melonjak naik karena biaya transportasi yang bertambah dan harga dikarenakan permintaan tinggi.⁶⁴

Kesimpulannya adalah, jika kondisi petani pada saat musim panen gagal akan menerima harga gabah yang lebih tinggi untuk di jual tetapi dengan hasil panen yang lebih sedikit dan sebaliknya jika panen melimpah maka harga akan lebih rendah tetapi dengan hasil yang lebih banyak. Begitu juga dengan peternak ayam dan telur harga akan tinggi jika hasil produksi ayam sedikit dan permintaan naik seperti hari hari raya idul adha, idul fitri, natal dan tahun baru.

2. Gambaran Pedagang Desa Purwotani

Pedagang sudah menjadi bagian yang lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, terlebih pada masyarakat desa Purwotani Kec. Jati Agung, Kab. Lampung selatan, Prov. Lampung. Peran pedagang sangatlah berperan dalam penyediaan bahan pokok di masyarakat.

⁶³ Salimun, Wawancara Dengan Petani Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018

⁶⁴ Trimi, Wawancara Dengan Peternak Ayam Kecamatan Jati agung, Tanggal 12 Januari 2018.

Masyarakat mendapatkan barang-barang kebutuhan baik pakaian dan bahan pangan atau bahan pokok dari pedagang yang berada di desa Purwotani. Sebagai perantara untuk menyampaikan barang bahan pokok dari petani kepada masyarakat, pedagang di desa Purwotani merupakan salah satu wadah untuk menampung kegiatan masyarakat.

Pedagang di desa Purwotani menjual barang jualannya di warung yang mereka miliki, ada yang menjual bahan pokok secara khusus seperti hanya menjual beras atau telur dan minyak goreng, ada juga yang menjual semua bahan pokok yang mana dapat di beli secara eceran ataupun per-kiloan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membeli. Setidaknya setiap satu dusun akan tersedia pedagang yang menjual kebutuhan bahan pokok.

Pedagang yang berada di desa purwotani kebanyakan sudah lama menjadi pedagang atau penyedia bahan pokok di desa purwotani, seperti ibu Ayu yang berusia 28 tahun yang tinggal di dusun 1, ibu Ayu adalah salah satu pedagang yang menjual bahan pokok. Ia mengaku sudah sejak kecil berprofesi sebagai pedagang dan melanjutkan usaha dari keduaorang tuanya, di warung ibu ayu menyediakan beras, bawang, gula, minyak dan telur ayam ataupun telur bebek.⁶⁵

⁶⁵ Ayu, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 1 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

Berikut nama para pedagang yang berada di desa Purwotani:

Tabel 3.6
Pedagang Desa Purwotani

No	Nama	Dusun	Keterangan
1	Yani	1	Pedagang Bawang, Telur, Ayam
2	Wagimin	1	Pedagang Beras
3	Silab	1	Pedagang Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
4	Iyem	2	Pedagang Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
5	Ayu	1	Pedagang Beras, Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
6	Danimah	2	Pedagang Beras
7	Suki	4	Pedagang Beras, Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
8	Simin	3	Pedagang Beras, Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
9	Baidi	4	Pedagang Beras, Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
10	Jarmin	5	Pedagang Beras, Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
11	Jarim	5	Pedagang Beras
12	Salimun	3	Pedagang Beras
13	Sudar	4	Pedagang Beras
14	Deni	5	Pedagang Beras, Bawang, Telur, Ayam, Gula, Minyak Goreng
15	Trimi	-	Peternak Ayam Kecamatan Jati Agung
16	Handoyo	-	Pemasok Beras Kecamatan Jati Agung

Sumber: Data primer diolah Januari 2018

Peran pedagang tidak hanya menyediakan bahan pangan atau bahan pokok bagi masyarakat desa, peran pedagang juga dapat menetapkan nilai-nilai harga suatu barang bahan pokok dan jasa yang ada di desa. Dimana dalam hal ini terdapat dua mekanisme penentuan harga yaitu penetapan harga pembelian di petani dan penetapan harga penjualan di konsumen, yang mana mekanisme penetapan harga tersebut akan di jabarkan sebagai berikut:

a. Harga Pembelian Di Petani Oleh Pedagang

Dalam jual beli bahan pokok di desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung selatan, Prov. Lampung, pada dasarnya sama saja dengan jual-beli seperti lainnya. Pedagang akan membeli bahan pokok terlebih dahulu ke petani sebagai penyedia atau pemasok bahan pokok utama, lalu akan menjual ke masyarakat desa Purwotani.

Dalam menentukan harga pembelian di pemasok/petani pedagang tidak memiliki ruang bebas dalam menentukan harga, pedagang akan langsung menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pemasok/petani, tetapi pedagang akan mendapatkan sedikit potongan harga jika pedagang membeli dengan jumlah lebih banyak. Dimana pada bahan pokok seperti beras, telur, bawang yang mana sebelumnya harus memesan terlebih dahulu dan akan datang 1 atau 2 hari bahkan lebih dari hari yang telah ditentukan.⁶⁶

Untuk bahan pokok pada saat menjelang hari raya idul fitri, idul adha, hari natal dan tahun baru pedagang merasa kesulitan mendapatkan barang dari petani ataupun pemasok. Hal ini tidak terlepas dari permintaan yang tinggi pada masyarakat dan memaksa permintaan yang juga tinggi oleh pedagang ke petani oleh semua

⁶⁶ Jarim, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 5 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

pedagang tidak hanya di desa purwotani bahkan di desa lainpun terjadi hal yang sama.⁶⁷

Para pedagang akan berebutan bahan pokok sesama pedagang kepada pemasok/petani, hal ini yang mengakibatkan bahan pokok di pemasok/petani cepat habis bahkan pedagang yang tidak mendapatkan bahan pokok terpaksa mencari ke pemasok/petani lain yang lebih jauh jaraknya dan menyediakan bahan pokok tersebut. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh akan membuat pedagang mengeluarkan biaya yang cukup banyak, oleh sebab itu pedagang tidak mungkin menjual barang dagangannya dengan harga dibawah harga pasar melainkan akan menaikkan harga sedikit yang masih terjangkau oleh masyarakat. Biasanya jika pedagang kesulitan memperoleh barang pedagang akan membeli ke daerah lain seperti ke Palas, Metro ataupun keluar daerah kabupaten lain bahkan keluar provinsi lampung. Inilah yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok yang di beli ke petani, dan juga karena berebutnya dengan pedagang lain untuk mendapatkan barang dan bertambahnya biayayang lain.⁶⁸ Tidak hanya itu, menurut ibu Iyem Pedagang Dusun 2 Desa Purwotani pada saat terjadi musim kemarau, musim penghujan, bahkan terjadi gagal panen, hal ini akan menyebabkan

⁶⁷ Simin, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 1 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

⁶⁸ Jarmin, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 5 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

naik turunnya harga dan membuat ketersediaan bahan pokok sulit untuk didapatkan.⁶⁹

Kami para pedagang sering mengeluhkan harga yang tinggi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang kurang mendukung, kami para pedagang tau tentang peraturan penetapan harga yang dibuat pemerintah tetapi itu tidak berpengaruh terhadap harga yang ada di petani, petanipun tidak mau merugi dengan terjadinya sedikit barang dan gagal panen dan kamipun tidak mengambil keuntungan lebih dari sebelumnya bahkan kami para pedagang yang lebih banyak berkorban dengan bertambahnya modal yang harus kami keluarkan untuk membeli bahan pokok dengan harga tinggi. Bukan hanya harga yang tinggi, kondisi / kualitas bahan pokokpun kurang bagus, kita memesan dengan kualitas A tetapi yang kami dapat kualitas B dan harga tetap di kualitas A.⁷⁰

Menurut Bapak Handoyo, salah satu Petani Beras dan Pemasok beras di kecamatan Jati Agung dalam menetapkan harga penjualan ke pedagang melihat harga pasar jika permintaan pasar tinggi maka kami akan mengambil gabah di petani dengan harga tinggi, dan jika permintaan turun maka kami mengambil gabah ke petani akan sedikit berkurang. kondisi alam bisa menentukan harga yang kami dapatkan jika panen gagal atau kurang memuaskan maka kami

⁶⁹ Iyem, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 2 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

⁷⁰ Suki, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 4 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

membeli gabah ke petani menjadi mahal dikarenakan untuk menutupi modal dan biaya selama tanam padi. Selain itu program stop impor beras yang pernah dilakukan oleh bapak presiden juga mempengaruhi harga, dikarenakan stok beras yang kurang membuat gabah yang ada di petani menjadi mahal. Dari penjelasan bapak Handoyo, ketiga kondisi di atas sangatlah berpengaruh terhadap kenaikan harga yang mana tidak dapat di hindari karena harga pasar yang murni tercipta di pasar tanpa ada permainan harga atau monopoli barang pasokan.⁷¹

Selain itu, Kenaikan harga pupuk/ bahan pangan peternakan untuk peternak ayam, dapat menjadikan harga bahan pokok melambung tinggi. Untuk petani memperoleh hasil yang maksimal haruslah merawat tanaman dengan maksimal pula dengan memberi pupuk.⁷²

Setelah melakukan wawancara kepada para pedagang desa purwotani dan pemasok beras kecamatan Jati Agung, berikut kesimpulan macam-macam harga bahan pokok yang dibeli oleh pedagang desa Purwotani di petani saat harga stabil dan harga tinggi:

⁷¹ Handoyo, Wawancara Dengan Pemasok Beras Kecamatan Jati Agung, Tanggal 12 Januari 2018.

⁷² Sudrajat, Wawancara Dengan Petani Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

Tabel 3.7
Daftar Harga Pembelian di Petani Saat Harga Stabil

No	Barang Bahan Pokok	Harga Pembelian di Petani
1	Beras	Rp.7.300-10.000/Kg
2	Gula	Rp.9.500-10.500/Kg
3	Minyak Goreng	Rp.8.000-9.000/L
4	Bawang	Rp.14.000-16.000/Kg
5	Ayam	Rp.20.000-27.000/Kg
6	Telur	Rp.19.000-21.000/Kg

Sumber: Data primer diolah Januari 2018

Tabel 3.8
Daftar Harga Pembelian di Petani Saat Harga Naik

No	Barang Bahan Pokok	Harga Pembelian di Petani
1	Beras	Rp.10.000-12.000/Kg
2	Gula	Rp.10.500-11.500/Kg
3	Minyak Goreng	Rp.10.000-11.000/L
4	Bawang	Rp.17.000-19.000/Kg
5	Ayam	Rp.25.000-33.000/Kg
6	Telur	Rp.22.000-24.000/Kg

Sumber: Data primer diolah Januari 2018

Pada tabel 3.7 dan 3.8 diatas, dapat di ketahui harga-harga bahan pokok pembelian di petani saat harga stabil dan harga naik. Hampir setiap pedagang mendapatkan harga pembelian di petani seperti di atas. Harga diatas saat harga naik tidak pasti, ketika di tempat biasa barang bahan pokok sedang kosong dan mengambil ke luar daerah maka harga yang di dapatkan berbeda, bertambahnya ongkos transportasi dan ditambah kita berebutan dengan pedagang lain yang bermain di harga yang lebih tinggi.⁷³

Selain itu, jika pedagang sama sekali tidak mendapatkan barang terkadang pedagang membeli dengan kualitas yang lebih bagus

⁷³ Baidi, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 4 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

karena barang bahan pokok kualitas bagus ketersediaan barang cukup banyak namun harga yang jauh lebih mahal.⁷⁴

Permintaan pedagang yang meningkat, kekuarangan keersediaan barang bahan pokok dan musim yang tidak teratur bahkan gagal panen menjadikan pembelian di petani dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan, jika pembelian di luar daerah membuat pedagang juga memperhitungkan biaya trasnpotasi yang jauh.

b. Harga Penjualan Di Konsumen Oleh Pedagang

Dalam penjualan ke konsumen atau masyarakat pedagang di desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung selatan, Prov. Lampung dalam menentukan harga tidaklah berbeda dengan hari-hari biasanya, beberapa pedagang tetap mengambil keuntungan di antara Rp.500-1.500/Kg. dan ada juga mencapai Rp.2.000/Kg jika bahan pokok yang di dapat jauh di karenakan menghitung biaya transportasi.

Menurut bapak Wagimin, kita para pedagang menjual bahan pokok dari harga stabil ke harga tinggi tetap mengambil keuntungan yang sama, bisa saja hingga Rp.3.000/Kg dikarenakan bahan pokok yang di dapat kita mencari sendiri hingga jauh maka menghitung biaya transportasi, berbeda dengan pemasok biasanya ketika barang sedang stabil mereka sendiri yang menyediakan langsung jika kita sudah memesan. Namun saat ini kita sedang rebutan barang bahan

⁷⁴ Baidi, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 4 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

pokok jika tidak dapat terpaksa cari keluar daerah dan membebankan biaya transportasi untuk menjaga ketersediaan barang di desa.⁷⁵

Senada dengan bapak suki, harga yang kami tetapkan tidaklah berbeda dengan harga pada saat barang stabil, sering kali kita di bilang ngambil keuntungan besar, padahal kita mengeluarkan modal lebih besar tetapi keuntungan sama saja seperti biasanya.

Berikut kesimpulan macam-macam harga bahan pokok yang dijual oleh pedagang desa Purwotani ke konsumen saat harga stabil dan harga tinggi:

Tabel 3.9
Daftar Harga Penjualan di Konsumen Saat Harga Stabil

No	Barang Bahan Pokok	Harga Penjualan di Konsumen
1	Beras	Rp.10.000-12.000/Kg
2	Gula	Rp.10.000-11.500/Kg
3	Minyak Goreng	Rp.9.000-10.000/L
4	Bawang	Rp.14.000-16.000/Kg
5	Ayam	Rp.21.000-25.000/Kg
6	Telur	Rp.20.000-22.000/Kg

Sumber: Data primer diolah Januari 2018

Tabel 3.10
Daftar Harga Penjualan di Konsumen Saat Harga Naik

No	Barang Bahan Pokok	Harga Penjualan di Konsumen
1	Beras	Rp.12.000-14.000/Kg
2	Gula	Rp.11.500-14.000/Kg
3	Minyak Goreng	Rp.11.000-12.000/L
4	Bawang	Rp.17.000-19.000/Kg
5	Ayam	Rp.30.000-36.000/Kg
6	Telur	Rp.24.000-27.000/Kg

Sumber: Data primer diolah Januari 2018

⁷⁵ Wagimin, Wawancara Dengan Pedagang Dusun 4 Desa Purwotani, Tanggal 12 Januari 2018.

Dari tabel 3.4 dan 3.5 dapat di ketahui harga-harga bahan pokok penjualan di konsumen saat harga stabil dan harga naik. Hampir setiap pedagang menjual harga penjualan di konsumen seperti di atas. Dari hasil wawancara dan dokumentasi di atas, pedagang menentukan harga menjual ke konsumen berdasarkan harga ketika mereka membeli di petani dan menghitung biaya transportasi jika barang yang di dapat jauh. keuntungan yang di ambil sama saja dengan ketika harga stabil atau relatif rendah.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menstabilkan Harga

Beberapa bulan ini melonjaknya harga beras yang beredar di masyarakat cukup mengagetkan dan menjadi perhatian semua pihak. Kenaikkan harga beras yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Seperti ekonomi, politik dan kehidupan sosial karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah disini mempunyai peran penting dan akan ikut campur dalam rangka untuk mensejahterakan kehidupan para petani dan juga masyarakat, terlebih pada saat menjelang hari raya idul adha, idul fitri, natal dan tahun baru. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Lasminingsih mengatakan, pantauan harga menjadi salah satu cara pemerintah pusat memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan."Pemerintah ingin menjelang puasa stoknya cukup dan harganya stabil. Alhamdulillah, jika di daerah lain ada keluhan

cabai mahal, di Lampung yang penting ada cabai keriting, dan harganya cukup stabil," kata Lasminingsih saat meninjau Pasar.⁷⁶

Dalam hal ini juga pemerintah memerintahkan dinas perindustrian dan perdagangan menggelar operasi pasar beras cadangan pemerintah. Operasi pasar pemerintah itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta pengadaan beras petani di Lampung sebanyak 1.500 ton per hari, sementara target pengadaan beras tahun ini 140.000 ton. Selain itu juga, pemerintah mengadakan pasar murah yang mana bahan-bahan pokok yang dijual di dalam pasar ini sangat terjangkau oleh masyarakat.

Selain upaya menstabilkan harga pemerintahpun akan menjaga kesejahteraan para petani, salah satunya yaitu dengan meminta/ sosialisasi petani tidak lagi menjual hasil panen dalam bentuk gabah, melainkan dalam bentuk beras. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Lampung beberapa waktu lalu. "Sesuai arahan pak Jokowi, kedepan petani di Lampung saya minta untuk tidak menjual gabah, melainkan beras, dan pemda yang akan membeli beras petani ini. Mengapa demikian, supaya petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga tidak ada istilah harga gabah anjlok di Lampung. Demi mensejahterakan petani padi di Lampung, pemerintah Kabupaten (PEMKAB) kedepannya akan memfasilitasi segala keperluan para petani mulai dari penanaman sampai panen."⁷⁷

⁷⁶ Surya Mahendra, "Tinjauan Harga dan Stok Pangan di Lampung", Tribun Lampung, 1 Desember 2017.

⁷⁷ Hanif Mustafa, "*Langkah PemKab Untuk mensejahterahkan Petani Di Lampung*", Tribun Lampung, 4 Maret 2018.

Selain itu juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Arief Hartawan menambahkan, pihaknya telah memantau pergerakan inflasi di kabupaten/kota di Lampung. Dan Pemerintah daerah diharapkan memantau dan melaporkan perkembangan harga harian secara intensif, dan juga harus siap mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga bahan pokok yang sudah di luar batas kewajaran.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Oleh Petani dan Pedagang dalam Menetapkan Harga Pembelian Bahan Pokok di Desa Purwotani.

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan petani (Petani padi/bahan pokok) supaya tidak dirugikan, maka Menteri Perdagangan mengeluarkan perintah dalam menentukan harga acuan pembelian di tingkat petani bahwasanya telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya yang lain. Namun seringkali harga yang di peroleh di pasar tidak sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh menteri perdagangan. Dalam Implementasi menetapkan harga akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Harga Penjualan oleh Petani

Menteri perdagangan telah menetapkan harga-harga bahan pokok terlebih harga beras atau gabah yaitu dengan harga gabah kering Rp.3.700, gabah siap giling Rp.4.600, dan beras Rp.7.300, namun seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam implementasi oleh petani bahwa untuk menetapkan harga penjualan di pedagang tidak mengacu pada apa yang ditetapkan oleh menteri perdagangan dengan harga gabah kering Rp.5.000, gabah siap giling Rp.6.000, dan beras Rp.10.000, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi dan musim pada saat panen. Jika kondisi yang tak menentu yang mengakibatkan gagal panen, yang mana dapat mempengaruhi persediaan dan kualitas barang, sehingga pengaruh musim seperti ini sangat berpengaruh dengan naik turunnya harga. Dan jika pada saat panen melimpah maka persediaan barang akan berlebihan dan mengakibatkan harga turun mengacu dari peraturan menteri perdagangan.
- b. Menjelang hari raya seperti hari raya idul fitri, idul adha, natal, tahun baru dan hari-hari besar lainnya dimana permintaan bahan pokok lebih tinggi dari persediaan yang ada.
- c. Dan harga yang ditetapkan oleh petani berdasarkan kualitas, kuantitas dan jenis bahan pokok, semakin bagus kualitas, kuantitas dan jenis bahan pokok yang diminta pedagang ke petani maka harga akan semakin tinggi.

2. Implementasi Harga Penjualan Pedagang ke Konsumen

Implementasi pedagang dalam menetapkan harga yang akan dijual ke konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam memperhitungkan biaya transportasi, jika persediaan barang di tempat pemasok atau petani telah habis, maka pedagang akan mencari barang di tempat lain engan jarak tempuh yang cukup jauh.
- b. Pedagang menetapkan harga penjualan dikonsumsi berdasarkan harga yang didapatkan pada saat pembelian di petani dan melihat kondisi

pasar jika harga di pasar naik maka harga penjualan akan naik, namun jika harga turun maka harga penjualan di konsumen akan ikut turun.

- c. Pedagang menetapkan harga penjualan di konsumen berdasarkan jenis dan kualitas barang yang didapat. Semakin bagus kualitas yang didapat maka semakin tinggi pula harga yang akan dijual. Pedagang menetapkan harga ke konsumen berdasarkan kesulitan barang yang didapat. Seperti gagal panen, kekurangan pasokan barang, dan terjadi perebutan barang dengan pedagang lain, serta pedagang harus mencari barang di luar daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyebab harga yang tinggi terjadi karena diakibatkan oleh kondisi / musim serta permintaan yang tinggi menjelang hari raya / hari-hari besar lainnya yang terjadi pada saat bersamaan, kualitas kuantitas barang, persediaan barang dan biaya transportasi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, implementasinya di desa Purwotani, Kec. Jati Agung. Kab. Lampung Selatan, Lampung, tidak terdapat adanya penimbunan barang (monopoli), tidak adanya persaingan tidak sehat antar pedagang dan pemasok, dan tidak melanggar norma-norma syariat-syariat islam. Apa yang terjadi di desa Purwotani adalah murni harga pasar yang sedang terjadi saat ini terlebih kenaikan harga hanya dikarenakan

beberapa faktor seperti musim/cuaca, dan permintaan/penawaran pada saat hari-hari raya, harga berdasarkan kualitas, biaya transportasi. Dari uraian tersebut bahwa kasus di atas sama dengan kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, masa Khulafa Rasyidin, dan pada masa Umar bin Khatab yang telah dijelaskan pada bab 2 (Landasan Teori) pada halaman 45, pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi masa pengeklik sebagai akibatnya bahan makanan sangat langka oleh karena itu harga melambung tinggi, untuk mengatasinya Umar bin Khatab tidak mematok harga tertentu makanan tetapi mengirim dan mensuplai makanan dari Mesir dan dari Syam supaya harga tetap stabil. Dalam hal ini Umar bin Khatab mensuplai makanan karena memang di kota Mekah dan Madinah bukanlah sumber produksi.

Dari penjelasan di atas bahwasannya ikut campur tangan pemerinah dalam menstabilkan harga dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan perturan No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen dalam Pandangan hukum islam tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah belumlah sesuai, sebaiknya pemerintah menyuplai barang yang sedang langka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar harga kembali normal. Pemerintah boleh melakukan penetapan harga dan masih dibutuhkan apabila pedagang tidak mau menjual barang dagangannya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak ataupun pedagang menjual barangnya di bawah harga pasar, maka disinilah peran pemerintah berhak untuk menetapkan

harga dan para pedagang harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama walaupun sebenarnya ada unsur pemaksaan tetapi ini demi menstabilkan harga kembali yang ada dipasar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Oleh Petani dan Pedagang dalam Menetapkan Harga Pembelian Bahan Pokok di Desa Purwotani
 - a. Dalam menetapkan harga penjualan oleh petani ke pedagang adalah berdasarkan harga yang terjadi di pasar, kualitas/kuantitas jenis bahan pokok, serta persediaan barang, dan juga tingginya permintaan.
 - b. Dalam menetapkan harga penjualan oleh pedagang ke masyarakat adalah berdasarkan harga yang didapat di petani/pemasok, jenis kuantitas/kualitas barang bahan pokok, biaya transportasi, dan kesulitan/berebutan saat mendapatkan barang.
 - c. Dan menteri perdagangan dalam menetapkan harga memperimbangkan yaitu struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen dalam hal ini belum sesuai dengan syariat islam, dikarena dalam implementasi di pedagang desa Purwotani, Kec. Jati Agung tidak terdapat adanya penimbunan barang (Monopoli), tidak adanya persaingan tidak sehat antar pedagang dan pemasok, dan tidak pelanggaran norma-norma syariat Islam. Tetap peraturan ini masih dibutuhkan apabila pedagang tidak mau menjual barang dagangannya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak ataupun pedagang menjual barangnya di bawah harga pasar.

B. Saran

Saran-saran yang dapat di berikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan ikut andil dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan Pokok, jika terjadi gangguan pasokan atau harganya berada dibawah dan diatas harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah perlu mengimpor dan memantau untuk menjaga agar tidak menyebabkan sejumlah komoditas mengalami kelangkaan serta lonjakan harga yang cukup tinggi.
2. Bagi masyarakat harus belajar cara untuk mengatur kebutuhan dengan baik, dan pintar menentukan kebutuhan-kebutuhan apa sajakah yang

harus diutamakan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga kebutuhan pokok, agar terjadi kelancaran dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bunyana Sholihin. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Danang Sunyoto. *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*. Yogyakarta, PT. Buku Seru.
- Faruq Annabahan. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hanif Mustafa, "Langkah PemKab Untuk mensejahterahkan Petani Di Lampung", *Tribun Lampung*, 4 Maret 2018
- Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Isnaini Harahap dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kaelan MS. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Offline 1.3)
- Lukman Hakin. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012).
- M.B. Hendri Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Konisia, 2003.
- Muhammad Abdul Mannan. *Ekonomi Islam Teori & Praktek*. Di Terjemahkan oleh Potan Arif Harahap. (PT. IMTERMANS).
- Muhammad. *Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Nuralaili. *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung, Percetakan OSA, 2013.
- Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2001.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)*. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Surya Mahendra, "Tinjauan Harga dan Stok Pangan di Lampung", *Tribun Lampung*, 1 Desember 2017.
- Sugyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Undang-undang

- Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 27/M-DAG//PER/5/2017. Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di petani dan Harga Acuan Penjualan Di konsumen.